

Demokrasi Digital dan Kontribusi Mahasiswa Perangi Hoaks Dalam Lingkungan Kampus Universitas Pattimura

Welmince Turwey¹ Fricean Tututarima² Titus Gaite³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: welminceturwey@gmail.com¹

Abstrak

Praktik demokrasi digital menjadi salah satu fenomena yang terjadi sebagai dampak dari transformasi digital. Demokrasi digital membuka ruang yang fleksibel bagi masyarakat dalam berdemokrasi, tetapi disamping itu masyarakat juga dihadapkan dengan banjir informasi yang cenderung memuat hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi mahasiswa Universitas Pattimura sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan juga kaum terpelajar dalam melawan hoaks di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa Universitas Pattimura melihat demokrasi digital sebagai peluang bagi majunya demokrasi serta meningkatkan partisipasi dan perkembangan mahasiswa dalam berdemokrasi, dan hoaks dikatakan sebagai ancaman utama bagi demokrasi di ruang digital, dan kunci melawan hoaks adalah literasi digital, dan pentingnya penerapan nilai-nilai kesopanan, kejujuran, toleransi, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Hoaks, Literasi Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transformasi digital dan sifat terbuka demokrasi Pancasila memberi ruang terjadinya praktik demokrasi digital. Aksesibilitas dan penyebaran informasi yang cepat dan difasilitasi oleh media digital telah memudahkan penyaluran opini dan gagasan sehingga meningkatkan kemampuan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Ruby, 2014:81). Demokrasi yang difasilitasi dengan media digital meningkatkan partisipasi demokrasi di Indonesia dan menjadi instrumen pengukur transparansi pemerintahan, sebagai contohnya, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi. Disamping keunggulan yang diterima dan dirasakan, di era ini perasaan dan aspirasi yang diunggah dan dibicarakan di media digital kebanyakan mengandung ujaran kebencian dan hoaks, pengguna media digital dengan literasi digital rendah akan mudah menelan informasi yang dilihatnya.

Hal ini dibuktikan dengan Survei tahun 2020 oleh *Katadata Insight Center (KIC)* dan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Siberkreasi menunjukkan 30%-60% masyarakat Indonesia terpapar hoaks saat mengakses media digital, dan terdapat 21%-36% masyarakat Indonesia mampu mengenali hoaks, (Survei, 2020:43). Hoaks menjadi racun bagi demokrasi di era digital yang berdampak bagi rusaknya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, fenomena seperti kurangnya keadaban masyarakat, perseteruan yang tajam, dangkal dan tanpa data di media digital dan menyebarkan informasi tanpa diverifikasi terlebih dahulu.

Pemerintah melalui berbagai teknologi, kegiatan, dan instrumen hukum berusaha memerangi permasalahan digital ini, upaya-upaya seperti *Cyber Drone 9*, teknologi kecerdasan buatan untuk melacak dan melaporkan situs penyebar berita palsu, peluncuran

Program Literasi Digital Nasional, Gerakan Masyarakat Indonesia Anti Hoaks serta Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun sepertinya akar hoaks belum dapat dicabut dari tubuh masyarakat Indonesia, menghapus dan mengklarifikasi konten hoaks tidak menyelesaikannya. Peneliti melihat pelajar khususnya mahasiswa sangat dekat dengan teknologi digital dan paling tepat sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi, berwawasan luas dan objektif, sistematis, rasional serta penentu kualitas demokrasi. (Papilaya & Huliselan, 2016:57). Perubahan paling mendasar dalam masyarakat dan demokrasi.

Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon, hoaks juga menjadi racun bagi demokrasi dan kehidupan masyarakat. Kebebasan yang dimiliki disalahgunakan, ruang publik maya dijadikan tempat untuk melancarkan berita-berita bohong demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu, diperparah dengan rendahnya literasi digital. Hoaks yang pernah membuat panik masyarakat diantaranya hoaks bencana gempa disusul tsunami di Maluku (2019), penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di tengah konflik antara masyarakat Desa kariuw dan Dusun Ori (2022). Tempat belajar dan kaum terpelajar diharapkan dapat membersihkan dan memberi jalan bagi sehatnya demokrasi di Maluku pada era digital ini. Universitas Pattimura (UNPATTI) sebagai perguruan tinggi nomor 1 (satu) di Maluku yang menghasilkan banyak lulusan berkualitas, tempat lahirnya pemimpin-pemimpin hebat di Maluku dilihat peneliti sebagai tempat yang tepat dimulainya perang yang tajam dan berkelanjutan terhadap hoaks.

Kajian ini memfokuskan diri pada praktik demokrasi digital dan kontribusi mahasiswa Universitas Pattimura dalam memerangi hoaks di lingkungan Universitas Pattimura yang difokuskan pada tiga masalah yakni: bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Pattimura terkait praktik demokrasi digital? faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya hoaks di lingkungan Universitas Pattimura? dan Bagaimana kontribusi mahasiswa dalam upaya perangi hoaks di lingkungan Universitas Pattimura?

Guna mendekati ketiga masalah ini, digunakan teori dari (Ruby, 2014) *Social Media and Democratic Revolution*, bahwa aksesibilitas dan penyebaran informasi yang cepat dan difasilitasi oleh media digital telah memudahkan penyaluran opini dan gagasan sehingga meningkatkan kemampuan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selanjutnya media digital juga dapat mencemarkan demokrasi melalui disinformasi, penyesatan, propaganda, ujaran kebencian dan pesan negatif lainnya. (Sardini, 2018). Kemudian Faktor-faktor yang mendorong mahasiswa aktif bermedia sosial yaitu untuk menunjukkan eksistensi diri, mencari perhatian dan menumbuhkan citra; adanya kepentingan kelompok dan politik termasuk kontra terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. (Ainiyah, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dan memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Noor (2016:35). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 27 orang mahasiswa yang tersebar pada 9 fakultas di Universitas Pattimura dan menggunakan teknik purposive sampling (*judgement sampling*). Alat pengumpulan data penelitian adalah pedoman wawancara, yang memuat 15 pertanyaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Presepsi Mahasiswa Universitas Pattimura Terhadap Demokrasi Digital

Digitalisasi menghadirkan perubahan dalam masyarakat, perubahan terhadap media komunikasi adalah yang paling dirasakan pengaruhnya, komunikasi secara digital berpengaruh terhadap proses demokrasi yang lekat dengan informasi dan komunikasi. Demokrasi secara digital dipraktikan oleh masyarakat biasa, akademisi, aktivis, politisi serta lembaga pemerintah. Praktik demokrasi secara digital juga dilakukan oleh warga Universitas Pattimura (Unpatti) khususnya mahasiswa yang identitasnya adalah pemuda dan penerus bangsa. Berdemokrasi merupakan hak warga negara dan melalui kemudahan media digital aspirasi dapat disampaikan tanpa harus selalu “turun jalan” sehingga mengurangi risiko terjadinya perbuatan anarkis. Untuk mengetahui bagaimana mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) memanfaatkan media digital untuk demokrasi, berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa Informan.

Wawancara peneliti dengan Piter R. Lerrick salah satu mahasiswa FISIP Unpatti, mengatakan: “Saya dan teman-teman organisasi berusaha mengumpulkan massa melalui unggahan di media sosial, digitalisasi ini lahirkan cara komunikasi baru, tanpa undangan hanya melalui unggahan kita sudah bisa terhubung, teman-teman yang merasa terpanggil akan ikut bersuara, bahkan jika dirasa perlu maka kami “turun jalan” Dalam wawancara peneliti dengan Hendricho Hayer, salah satu mahasiswa FISIP Unpatti dalam wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022, mengatakan: “Cara saya menyampaikan pendapat di media digital tidak selalu dengan unggahan pribadi tapi lebih ke berkomentar langsung pada media sosial milik lembaga pemerintah atau media pemberitaan, komentar untuk menanggapi berita terbaru, mengkritisi kebijakan baru, atau menanyakan kejelasan proyek yang sedang dikerjakan pemerintah, sampaikan apapun yang jadi keresahan saya maupun lingkungan saya sesuai dengan fakta yang saya temukan”. Kemudian Gian Effendy salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menceritakan pengalamannya dalam wawancara, mengatakan bahwa: “Saya pernah mengkritisi kebijakan pemerintah melalui status WhatsApp saya, terkait digunakannya BPJS sebagai salah satu syarat jual beli tanah, kritikan itu juga sebagai bentuk saya menertawakan kebijakan tersebut, mungkin pemerintah punya alasan yang kuat untuk kebijakan itu tapi menurut saya itu lucu”.

Media sosial (*social media*) menjadi platform digital yang paling sering digunakan oleh mahasiswa Unpatti untuk berdemokrasi baik secara pribadi maupun dalam organisasi, media sosial dengan fungsi utamanya yaitu untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar informasi dimanfaatkan untuk berdemokrasi hal ini didorong oleh kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh media sosial, bentuk demokrasi yang dipraktikan di ruang digital berupa, kritikan terhadap kebijakan pemerintah dan menilai kinerja pemerintah, berpendapat terkait masalah-masalah tertentu, kampanye politik, mengumpulkan massa atau hanya sekedar menertawakan kebijakan yang dianggap tidak relevan. Sebagaimana disampaikan oleh (Ruby, 2014:81) dalam tesisnya yang berjudul “*Sosial Media and Democratic Revolution; The Impact of New Forms of Communication Democracy*” mengungkapkan bahwa aksesibilitas dan penyebaran informasi yang cepat dan difasilitasi oleh media digital telah memudahkan penyaluran opini dan gagasan sehingga meningkatkan kemampuan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demokrasi digital menambah akselerasi dan produktivitas demokrasi. (Mahliana, 2019:24)

Berdemokrasi secara digital digemari oleh masyarakat karena dinilai mampu mempertemukan berbagai pemahaman masyarakat di dalam satu media yang sifatnya langsung. Seperti hasil wawancara dengan Reindino Letedara, Mahasiswa FKIP Unpatti, yang menyebutkan bahwa: “Menyampaikan pendapat melalui media digital itu cukup berdampak

baik, karena meminimalisir risiko terjadinya tindakan anarkis, daripada selalu demo-demo di jalanan atau di gedung parlemen, kan panas, macet, belum lagi terbawa emosi sampai merusak fasilitas dan aset negara jadinya bisa menambah masalah bukan menyelesaikan". Kemudian keefektifan demokrasi digital juga disampaikan oleh Amarya Maahury, mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti, dalam wawancara, bahwa: "Kita sekarang hidup berdampingan dengan digitalisasi jadi berdemokrasi secara digital itu sangat efektif, setelah sebuah berita diangkat dan hangat di media sosial maka akan mendorong warganet (warga internet) untuk mencari tahu lebih dalam tentang berita tersebut, pengaruh baiknya orang tidak lagi buta informasi dalam negara ini, banyak yang jadi tahu apa haknya dan bagaimana hak itu dapat melindunginya".

Di samping keunggulan yang dirasakan, sebagian informan juga mengatakan kekurangan demokrasi digital, seperti disampaikan oleh Angel Sahusilawane, mahasiswa Fakultas MIPA, Unpatti, mengatakan bahwa: "Demokrasi digital menghadirkan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat, tapi kalau disalahgunakan maka dapat menghancurkan hubungan pemerintah dan masyarakat, kita sampaikan keresahan, kritikan, pendapatan, dan lain-lain nah kalau isinya ujaran kebencian dan berita bohong itu jadi fatal". Dan ditambahkan oleh Ramadhan Soulisa, mahasiswa Fakultas Pertanian, Unpatti yang juga seorang aktivis GMNI, mengatakan bahwa: "Demokrasi digital kurang efektif jika literasi rendah, lalu saat mendapat informasi langsung ditelan mentah-mentah, juga ada aspirasi yang tidak ditanggapi oleh pemerintah, kalau ramai biasanya ditanggapi".

Demokrasi digital menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam satu ruang yang cepat dan terbuka, keleluasaan dalam berpendapat, tercapainya tujuan berdemokrasi dengan cepat serta mengurangi risiko terjadinya tindakan anarkis sebagai bentuk pemaksaan kehendak oleh rakyat kepada lembaga pemerintah atau organisasi tertentu saat menyampaikan pendapat dalam demonstrasi. Namun praktik demokrasi digital tanpa literasi akan membawa masalah baru dan mengikis nilai demokrasi Pancasila melalui ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan masalah lain akibat menelan informasi mentah-mentah, sehingga "ibarat pedang bermata dua" ada positif dan negatifnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Allifiansyah, 2017:158) yang menyatakan media digital menjadi tempat beradunya agumen-argumen serta menjadi tempat pilihan untuk membentuk kekuatan yang mampu mengatasi batasan hirarki sosial. Media digital juga dapat mencemarkan demokrasi melalui disinformasi, penyesatan, propaganda, ujaran kebencian dan pesan negatif lainnya. (Sardini, 2018:129).

Di era digital keterbukaan menyerap ideologi-ideologi asing, masyarakat mulai menjadikan ideologi-ideologi baru sebagai alternatif yang berakibat pada hilangnya sikap tenggang rasa, saling menghargai, dan toleransi. Hal demikian dapat mengganggu eksistensi ideologi Pancasila, dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disampaikan oleh Jullidya P. Adoe, mahasiswa Fakultas Teknik, dalam wawancara bahwa: "Di era digital orang kira kita bebas menyampaikan pendapat, tapi dalam media digital kita punya data-data pribadi yang membuat orang mengenal kita melalui media digital itu, kalau misalnya kita menyampaikan yang di luar dari nilai-nilai pancasila, menghujat, mengadu domba, hal-hal itu akan jadi lebih anarkis daripada demo di jalan, sehingga nilai-nilai pancasila harus diterapkan dalam kehidupan untuk menjaga persatuan dan penghormatan terhadap kemanusiaan". Selanjutnya pendapat lain dari Dian Citra Priska, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, menyampaikan pendapatnya bahwa: "Nilai-nilai Pancasila sekarang sudah sangat dikesampingkan, lihat saja orang saling menghujat, buka HP lihat ada lagi info penistaan agama, masyarakat saling melempar komentar negatif di media sosial, toleransi sudah sangat tipis".

Demokrasi pancasila merupakan benteng demokrasi Indonesia, nilai-nilai yang melekat seperti penghargaan terhadap hak asasi orang lain dan toleransi, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta keadilan, tetapi lajunya digitalisasi menjadi tantangan bagi Demokrasi Pancasila, masyarakat lebih khusus pemuda disihir oleh kecanggihan yang ditawarkannya, masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri, menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian (*hate speech*), intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Hal demikian merusak prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, salah satunya yang disampaikan (Aswandi & Roisah, 2019:139) pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Kebebasan dalam Demokrasi Pancasila tidak benar-benar dimaknai sebagai kebebasan murni tetapi ada batasannya, yaitu kebebasan dengan penghargaan terhadap kebebasan orang lain, mengutamakan nilai-nilai ketuhanan dan penghargaan terhadap keyakinan orang atau kelompok lain.

Beberapa informan menyampaikan pengaruh demokrasi digital terhadap partisipasi dan perkembangan mahasiswa dalam berdemokrasi, dikatakan oleh Theo Paulus, mahasiswa Fakultas Hukum, bahwa: "Statement yang lagi berkembang sekarang No Viral, No Justice. Jadi kalau tidak viral maka tidak ada keadilan. Statement ini yang akhirnya memicu partisipasi dan perkembangan saya di sini dalam berdemokrasi". Selanjutnya pendapat dari Aprillia Tehupuring, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bahwa: "Pengetahuan politik dan demokrasi saya meningkat lewat praktik demokrasi digital, setiap buka medsos pasti ada isu baru yang dibicarakan apalagi sekarang kita mendekati tahun politik dan demokrasi". Kemudian wawancara dengan Piter Lerrick, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berpendapat bahwa: "Ada banyak sekali yang bisa kita lihat itu banyak mahasiswa kita punya grup-grup medsos maupun Whatsapp untuk membahas tentang sebuah isu barulah kita putuskan isu ini disampaikan lewat media saja atau langsung turun jalan". Dan pendapat lain disampaikan oleh James Rupiasa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, bahwa: "Keseriusan sebagian mahasiswa Unpatti dalam berdemokrasi dalam ruang digital masih minim, ada yang ikut-ikutan untuk kebutuhan *Instastory* tanpa tahu kejelasan isu, tidak lebih dari sebuah gaya-gayaan, hanya segelintir mahasiswa yang serius, ada mahasiswa yang hanya dalam kebutuhan tertentu mereka menyampaikan tetapi selesai kebutuhan tersebut mereka kemudian lupa ataupun tidak bertanggungjawab atas apa yang dituliskan atau disampaikan".

Bentuk demokrasi digital yang umumnya dilakukan mahasiswa Unpatti antara lain, menyampaikan aspirasi, dan mencari keadilan, penggalangan dana dan donasi digital, hal tersebut didukung dengan peran yang melekat pada diri mahasiswa itu sendiri yakni peran sosial yang berfokus pada pelayanan mahasiswa dalam masyarakat. Jika peran itu dikaitkan dengan praktik demokrasi digital maka dapat dikatakan mahasiswa sebagai kaum intelektual, melalui pemikiran kritis dan konkret menjembatani hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan kelompok/organisasi tertentu serta masyarakat dengan pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Faruq (dalam Sciences, 2016:14) mahasiswa mengontrol kehidupan masyarakat, dengan menjadikan dirinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Mahasiswa menjadi pelopor, penyampai aspirasi dan pelayan masyarakat. (Supardi, 2016:14). Disamping itu masih ada sebagian mahasiswa yang berdemokrasi di ruang digital untuk kebutuhan media sosial, menunjukkan eksistensi diri tanpa keriusan dan tanpa benar-benar tahu isu yang sedang dibahas, sebagaimana disampaikan oleh (Ainiyah, 2018:225) faktor yang mendorong pemuda aktif bermedia sosial yaitu untuk menunjukkan eksistensi diri, mencari perhatian dan menumbuhkan citra.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Maraknya Hoaks di Lingkungan Universitas Pattimura

Berita palsu atau yang disebut hoaks (*hoax*) ditetapkan sebagai masalah nasional, dampaknya pada tingkat yang serius dapat menyebabkan perpecahan bangsa, motifnya bermacam-macam mulai dari iseng, bisnis dan penipuan, hingga tujuan politik. Survei tahun 2020 oleh *Katadata Insight Center (KIC)* dan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Siberkreasi menunjukkan 30%-60% masyarakat Indonesia terpapar hoaks saat mengakses media digital, 11% pernah menyebarkan hoaks karena tidak terlalu memikirkan kebenaran informasi tersebut. Survei lanjutan tahun 2021 oleh *Katadata Insight Center (KIC)* dan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Siberkreasi isu politik diakui oleh 69,3% sebagai isu yang paling banyak mengandung hoaks atau informasi keliru. Hoaks juga beredar di lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti), baik itu hoaks yang berasal dari luar maupun dari dalam universitas, yang sifatnya sama-sama menggiring opini, meresahkan, membingungkan, mencemaskan dan merugikan warga Unpatti.

Disampaikan oleh Christina Sewta, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam wawancara, bahwa: "Orang lebih suka viral daripada melakukan kebaikan, dengan dalil apapun mereka akan melakukan dalam hal ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan termasuk sebarkan hoaks. Kedua adanya tujuan politik. Ketiga, tidak mempunyai jiwa empati, karena jiwa empati inilah yang akan menentukan bagaimana dia akan menggunakan media sosial untuk kebaikan dan keempat kurangnya kontrol, kontrol pemerintah baru ada setelah info hoaks sudah viral". Selanjutnya dalam wawancara peneliti dengan Jullidya Adoe, mahasiswa Fakultas Teknik, mengatakan bahwa: "Tingkat pengetahuan itu sangat mempengaruhi, apalagi malas membaca dan hanya tahu info lewat potongan video di *facebook* langsung sebarkan, kebanyakan orang lebih suka dengan yang berbau sensasi, si pembaca berita merasa berita itu menarik sehingga perlu untuk dibagikan, ini jadi sebab hoaks ada dimana-mana". Dan pendapat dari Theo Peter, mahasiswa Fakultas Hukum dalam wawancara, mengatakan bahwa: "Uang jadi salah satu faktor, terutama bagi konten creator dan youtuber, karena dengan adanya penyebaran hoaks maka penonton semakin tertarik melihat berita otomatis banyak menghasilkan uang juga".

Terdapat beberapa faktor penyebab maraknya hoaks, yaitu rendahnya literasi digital sehingga mudah terprovokasi, terburu-buru untuk menyebarkan tanpa memverifikasi dan media digital merupakan media bebas sehingga apa saja dapat disebar dan diterima di dalamnya, sebagaimana disampaikan oleh (Latupeirissa, Pasalbessy and Leasa, 2021) masyarakat Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial dan media daring merupakan salah satu masyarakat yang perkembangannya tanpa melewati tahapan literasi. Ada tiga faktor masyarakat Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai konten hoaks yaitu rendahnya minat baca masyarakat, tidak memeriksa kebenaran dan keaslian berita, terlalu cepat dalam menyimpulkan suatu informasi. Ryan Ariesta (dalam Juditha, 2018:40). Kemudian faktor-faktor lain yang juga berpengaruh yaitu keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan citra diri, lebih tertarik pada sensasi dan kehebohan, bisnis dan penipuan, tujuan politik serta iseng-isengan, yang juga disampaikan oleh (Juditha, 2018:40), masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan politik, kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri, sehingga hoaks selalu berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Dari sisi pembuat hoaks faktor-faktor pendukungnya yaitu kepentingan kelompok dan politik, tujuan bisnis dan penipuan, menunjukkan eksistensi dan citra diri, atau hanya sekedar iseng, sedangkan dari sisi penerima hoaks faktor-faktor penyebab mudahnya terpapar berita hoaks yaitu, literasi digital rendah, malas verifikasi berita dan cenderung tertarik pada informasi yang memuat sensasi, isu SARA, dan politik. Sejak pandemi Covid-19 terjadi

percepatan transformasi digital peralihan dalam aspek-aspek vital seperti pendidikan, ekonomi dan bisnis hingga politik dan demokrasi. Masyarakat didesak untuk erat dengan media digital, intensitas masyarakat dengan media digital inilah yang berpengaruh pada besarnya hoaks yang dikonsumsi, disamping itu data dari laman web kominfo.go.id menyebutkan sekitar 800.000 situs diindikasikan sebagai situs penyebar hoaks. Dalam wawancara peneliti dengan Arnaldo Ruff, mahasiswa FISIP Unpatti dalam hasil wawancaranya, bahwa: "Hoaks sering muncul pada keadaan genting, contoh paling banyak itu pada awal pandemi, pencegahan-pencegahan Covid-19 melalui makanan-makanan tertentu, masyarakat saat itu sangat mudah terprovokasi sehingga langsung mengonsumsi makanan yang disebut, salah satu makanan yang populer pada masa itu adalah makan telur rebus, berita dan kejadian itu mungkin sampai kini masih membekas hangat dan masih kita ingat sampai sekarang, sangat meresahkan karena informasi tersebut dipercaya dan cukup diterima dalam masyarakat".

Dan wawancara peneliti dengan Ramadhan Soulisha, mahasiswa Fakultas Pertanian, mengatakan bahwa: "Soal UU Cipta Kerja, tuh kan kemaren udah banyak yang demo dan juga banyak berita-berita hoax apalagi lihat potongan-potongan pasal-pasal yang sudah beredar di sosial media tapi belum jelas betul bahwa memang itu dikeluarkan langsung oleh DPR atau bukan. Di bagian pemerintah mungkin isu-isu yang tersebar tentang kepolisian, kemudian mendekati pemilu ada beberapa hoax yang membuat panas, apalagi dalam kondisi Indonesia sekarang ini yang dibidang darurat hukum, itu banyak sekali pihak memanfaatkannya untuk mengompori apalagi konsumsi masyarakat itu apa yang lagi viral padahal belum tahu itu benar atau tidak".

Hoaks dikemas dalam bentuk teks, gambar dan video dengan judul sensasional dan bombastis, sumber berita anonim atau tidak jelas, gambar yang diberi keterangan waktu dan penjelasan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggalan video hasil suntingan, pesan berantai yang berisi seruan untuk menyebarkan, tautan bantuan sosial dan hadiah, informasi terkait politik dan hukum dalam suatu negara, isu SARA, pada keadaan darurat baik itu kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Hoaks marak pada keadaan darurat seperti yang disebutkan bahwa hoaks meningkat pada masa pandemi Covid-19 yang kita kenal sebagai salah satu keadaan darurat di dunia termasuk negara ini, salah satu contohnya di Maluku pernah heboh dengan informasi bahwa mengonsumsi telur rebus sebelum tengah malam dapat mencegah terinfeksi virus Corona dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat, demikian juga dengan sendi utama dan sensitif dalam negara seperti pemerintah, politik dan hukum, ditemukan hoaks terkait Pemilu 2024 dimana beredar informasi bahwa Presiden dapat mencalonkan diri hingga tiga periode.

Hal ini disampaikan oleh (Simarmata, 2019), terkait ciri-ciri hoaks yaitu redaksi pemberitaan tidak ada, sensasional, provokatif (memuat kata-kata sebar, like dan share sebelum terlambat, rugi kalau tidak klik), berita yang disampaikan sudah *expire* (habis waktu), diskriminatif, tempat dan tanggal kejadian tidak jelas, tidak logis, aneh dan menekankan isu SARA. Kemudian masyarakat cenderung percaya pada berita yang dilihatnya berkali-kali atau viral, informasi tidak akurat dan tidak realistis sekalipun dapat dipercaya jika dilihat berkali-kali atau banyak yang menyebarkannya. (Fitriani et al., 2019:14), Hoax yang banyak disebar berulang-ulang melalui media sosial dapat membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar adanya.

Pada usia pemilih pemula mahasiswa Unpatti memiliki ketertarikan dalam bidang demokrasi dan politik hal ini dibuktikan dengan keaktifannya dalam memanfaatkan media digital sebagai ruang bersuara. Hoaks menjadi racun bagi demokrasi dan menyentuh mahasiswa, sehingga berikut ini wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa Unpatti

terkait kebal tidaknya lingkungan Unpatti sebagai lingkungan akademis terhadap hoaks. Wawancara peneliti dengan James Charlie Rupiasa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Unpatti, mengatakan bahwa: "Satu per dua, entah dosen maupun mahasiswa masih ada yang termakan hoax, hoax itu beredar di luar kampus, dan dikembangkan di dalam kampus, saya lihat ini pada pesan forward di WhatsApp maupun unggahan mereka, selain itu mahasiswa sekarang sudah jarang nonton TV, kebanyakan berita itu didapat dari media sosial, hal ini juga yang menjadi jalan tersebarnya hoax".

Disampaikan juga oleh Fikram Hahury mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahwa: "Lingkungan akademik tidak menjamin juga bahwa bisa kebal hoaks, tergantung daya kritis mahasiswa tersebut terhadap berita, jadi kalau mahasiswa yang punya daya kritis maka dia akan melihat berita itu dengan baik, kira-kira sekitar 50% mahasiswa di lingkungan Unpatti ini sudah bisa menilai, memilah dan memilih berita". Kemudian dalam wawancara peneliti dengan Sarah Stevani. M, mahasiswa Fakultas Pertanian, yang berpendapat bahwa: "Belum sih, karena terbukti saja banyak dari mahasiswa yang terjun langsung dalam demo padahal demo tersebut belum terbukti bahwa apa yang mereka demokan itu adalah yang benar atau tidak, jadi lingkungan akademik ini jika dikatakan sudah atau belum kebal, menurut saya belum".

Lingkungan Unpatti sebagai lingkungan akademik tidak menjamin kebal tidaknya terhadap berita hoaks, yang menurut Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU), didapati mahasiswa dan dosen yang masih percaya bahkan menyebarkan berita hoaks melalui aplikasi obrolan dan media sosial, turut serta dalam aksi demo tanpa memahami akar masalah menunjukkan bahwa mahasiswa di lingkungan Unpatti mudah terpapar dan percaya hoaks, pendapat lain mengatakan warga universitas sudah cukup baik dalam memilah dan memilih informasi, untuk dapat memilah dan memilih informasi diperlukan daya kritis yang tinggi. Mahasiswa Unpatti menyerap hoaks melalui media sosial, diperparah dengan kurangnya minat baca dan kurang mencari informasi melalui media mainstream seperti TV, serta dipengaruhi oleh sifat lebih mengutamakan kesenangan daripada memanfaatkan lingkungan kampus sebagai tempat berdiskusi dan belajar. Disampaikan oleh (Fatkhurahman, 2018:425) bahwa tingkat kesanggupan mahasiswa dalam menilai sebuah hoaks berada pada tingkat sedang, kemampuan mahasiswa dalam menguji kebenaran masih belum objektif sehingga dapat keliru dalam menilai.

Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Perangi Hoaks di Lingkungan Universitas Pattimura

Hoaks (*Hoax*) menjadi salah satu masalah serius di negara ini, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan memberi imbauan kepada media mainstream dan seluruh elemen masyarakat untuk melawan dan membasmi hoaks, selain itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah ini diantaranya, Kominfo dengan Cyber Drone 9 sang "polisi" internet Indonesia, peluncuran Program Literasi Digital Nasional, Gerakan Masyarakat Indonesia Anti Hoaks dan Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Universitas Pattimura melalui sub bagian Humas dan sub koordinator Kerjasama telah melakukan berbagai kegiatan dan kerjasama untuk mengatasi hoaks di lingkungan universitas, diantaranya bekerjasama dengan TNI dan Polri, Pattimura Media Group, Koran, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam upaya melawan hoaks serta menyisipkan materi hoaks pada setiap kegiatan kemahasiswaan dan pembekalan mahasiswa baru.

Untuk mendukung upaya pemerintah dan lembaga Universitas, disampaikan beberapa upaya secara individual maupun kolektif untuk memerangi hoaks oleh mahasiswa Universitas Pattimura, seperti dalam wawancara peneliti dengan dengan M. Zakir Aineka, mahasiswa FISIP, mengatakan bahwa: “Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah, saya tidak mudah untuk membagikan. Rata-rata kelemahan orang-orang ya seperti itu, mudah sekali melihat beritanya, terpengaruh, terbawa emosi, apalagi sifatnya berbau SARA, berbau kebencian dan lain sebagainya. itu mudah sekali untuk disebar. Kedua mungkin, jangan terlalu fanatik dengan hal-hal yang belum ada kebenarannya, harus dicari tahu dulu”.

Selanjutnya pendapat Amarya Maahury, mahasiswa Fakultas Hukum dalam wawancara mengatakan bahwa: “Cari kebenaran info tersebut sejelas-jelas mungkin, barulah ambil kesimpulan, jika itu hoaks maka saya langsung komentar di postingan itu “hoaks”, lalu *report* postingan itu agar pihak *platform* hapus dan blokir”. Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan Piter Lerrick, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disampaikan bahwa: “Sebagai mahasiswa saya tidak masa bodoh, kalau sudah tahu kepastian berita harus langsung menyampaikan dengan bukti ataupun dengan peraturan perundang-undangan agar orang lain juga ditolong”.

Tindakan mahasiswa Unpatti saat dalam menanggapi informasi yaitu, tidak membagikan informasi yang tidak jelas kebenarannya, mencari tahu pada lebih dari satu sumber dengan menerapkan prinsip menyaring dan pemikiran kritis, tidak terburu-buru percaya dan menunggu informasi resmi dari media terpercaya. Daya kritis menjadi yang terutama dalam proses analisis kebenaran sebuah informasi, dengan daya kritis seorang mampu melihat nilai dan makna, guna dan dampak dari sebuah informasi sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang dengan daya kritis yang tinggi akan mudah membedakan berita benar dan palsu (*hoax*). Sebagaimana dikatakan oleh (Hasfera, 2017:54), salah satu cara memerangi penyebaran *hoax* adalah dengan membangun masyarakat literasi, yang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memfilter informasi sebelum digunakan atau dibagikan, dan kuncinya adalah pemikiran kritis.

Langkah-langkah lain yang dilakukan mahasiswa Unpatti jika sebuah informasi teridentifikasi hoaks yaitu melapor atau memberi masukan, media seperti media sosial dilengkapi dengan fitur *Report* (lapor) dan *Goggle* memiliki fitur *Feedback* (masukan) yang memudahkan penggunaannya untuk melapor atau memberi masukan jika menemukan konten yang terindikasi hoaks dan hal negatif lainnya; melapor ke pihak berwajib seperti kominfo dengan mengirim email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id, untuk lingkungan kampus dapat melapor ke sub bagian humas universitas; serta memberi tahu kejelasan informasi kepada sesama pengguna media digital dan masyarakat sekitar melalui akun media sosial. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Unpatti telah melakukan kewajibannya dalam menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi (PP No. 60/1999) dan menjalankan peran intelektual, moral dan sosial (Supardi, 2016:14).

Menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa untuk “memerangi” hoaks, dengan kewajiban dan perannya mahasiswa diharapkan dapat “memerangi” hoaks, sebagai bentuk kontrol dalam masyarakat, menghargai ilmu dan pengetahuan, menjunjung nilai dan moral, menjaga nilai-nilai luhur bangsa, serta menjaga nama baik perguruan tinggi. Dalam wawancara peneliti dengan beberapa informan didapatkan upaya mahasiswa dalam memerangi atau melawan hoaks, seperti salah satunya dalam wawancara dengan Arnaldo Ruff, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hasilnya sebagai berikut: “Saya mahasiswa FISIP, saya juga terakomodir dalam suatu wadah organisasi yaitu HMPS dan PMK, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya lebih membuka ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang belajar, saya rasa perlu

adanya kerjasama misalnya HMPS bekerja sama dengan media, atau pihak universitas yang punya kapasitas atau kedudukan disitu, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sesuatu yang membuka pikiran-pikiran mereka terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan media digital ini untuk kebaikan bersama, untuk menjaga keutuhan NKRI, untuk menjaga eksistensi kita sebagai seorang akademisi”.

Selanjutnya dari wawancara peneliti dengan James Charlie Rupiasa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dikatakan bahwa: “Melakukan kampanye anti hoaks melalui media sosial, melalui setiap kesempatan dalam diskusi organisasi maupun kegiatan kemahasiswaan yang saya ikuti”. Pendapat lain disampaikan oleh Theo Paulus, mahasiswa Fakultas Hukum, bahwa: “Menekan pihak universitas untuk mengeluarkan regulasi yang dapat membasmi hoaks di lingkungan kampus ini”. Mahasiswa Unpati telah cukup peduli dengan masalah nasional ini, dilihat dari perbuatan-perbuatan positif yaitu, memanfaatkan organisasi Intra kampus seperti HMPS, dan organisasi ekstra kampus seperti GMKI, untuk membahas dan mencari tahu kejelasan sebuah berita hoaks lewat diskusi dan kegiatan-kegiatan positif seperti pengkajian masalah dan kolaborasi dengan lembaga dan media; mahasiswa Unpatti memilih untuk menegur dan memberikan arahan kepada penyebar hoaks, menegur dengan memberitahukan bahaya hoaks dan aturan perundang-undangan; melakukan kampanye anti hoaks melalui media sosial maupun dalam setiap kegiatan akademik dan sosial. Mengangkat masalah hoaks dalam diskusi kemahasiswaan dan organisasi merupakan salah satu langkah memerangi hoaks yang cukup efektif, sebagaimana dikutip dari situs web kominfo, salah satu cara melawan hoaks adalah bergabung dalam grup diskusi anti hoaks (Kominfo.go.id 2017), hal tersebut melatih kepekaan dan daya kritis dalam menilai berita.

Dalam memerangi hoaks, baik di lingkungan kampus, masyarakat tempat kita tinggal atau dalam jangkauan yang lebih luas dalam media sosial, ada nilai-nilai yang perlu dijunjung, seperti yang dikatakan oleh mahasiswa Unpatti dalam hasil wawancara dengan Fajrin, mahasiswa Fakultas Pertanian, dikatakan bahwa: “Menjaga nilai dalam masyarakat dalam bentuk bertoleransi, saling bahu membahu, hidup berdampingan dengan damai. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, ketika ada berita hoaks yang tersebar dan meracuni masyarakat maka tidak perlu berkoar-koar tapi bisa tukar pikiran dengan rekan mahasiswa maupun masyarakat”. Selanjutnya dalam wawancara peneliti dengan Yusril Nuhuyan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berpendapat bahwa: “Mahasiswa harus mampu mengembangkan kembali nilai kejujuran, dan pemikiran kritis dalam masyarakat sehingga mampu menganalisa berita, paling efektif itu berbaur dengan masyarakat barulah jelaskan pada masyarakat, pendekatan secara kekeluargaan lah”. Dan wawancara dengan Fadli Fauzan Latuconsina, mahasiswa Fakultas Teknik, hasilnya sebagai berikut: “Jangan masa bodoh ketika lihat sesama mahasiswa atau masyarakat sudah tersesat dengan kabar bohong, mahasiswa itu kepeduliannya harus tinggi”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa nilai toleransi, gotong royong, perdamaian, kejujuran, keadilan, kepedulian serta kekeluargaan perlu dijunjung tinggi supaya menjadi perisai bagi masyarakat dalam memerangi hoaks, nilai-nilai tersebut dimuat dalam Pancasila, sehingga dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila adalah benteng masyarakat dalam memerangi hoaks yang mengancam kedamaian, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pancasila digunakan sebagai landasan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa, semakin baik pemahaman seseorang tentang Pancasila maka semakin meningkat pula cara orang tersebut menyikapi *hoax* yang beredar. (Suryaningsih, 2020:48).

KESIMPULAN

Mahasiswa Universitas Pattimura melihat praktik demokrasi digital sebagai peluang dan tantangan bagi demokrasi dan kehidupan bermasyarakat. Peluangnya adalah akses informasi yang instan dan tanpa batas berpengaruh terhadap partisipasi dan perkembangan mahasiswa dalam berdemokrasi, demokrasi digital menyatuhkan berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam satu media yang akhirnya secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun lembaga perguruan tinggi, aksi demo di jalanan dan kantor-kantor pemerintahan yang berpotensi anarkis dapat dikurangi dengan berdemokrasi secara digital. Sedangkan tantangannya adalah banjir informasi dapat memperburuk demokrasi termasuk konsistensi mahasiswa Universitas Pattimura sebagai pemilih yang masih dalam kategori pemilih pemula, mengganggu stabilitas dan kemajuan negara termasuk pendidikan, serta dapat menyebabkan diintegrasikan baik dalam lingkungan Universitas Pattimura maupun masyarakat luas, masalah khususnya adalah hoaks (*hoax*), yang juga telah ditetapkan sebagai masalah nasional.

Mahasiswa Universitas Pattimura melihat faktor penyebab maraknya hoaks dalam dua sisi, yaitu: sisi pembuat hoaks faktor-faktor pendukungnya yaitu kepentingan kelompok dan politik, tujuan bisnis dan penipuan, menunjukkan eksistensi dan citra diri, atau hanya sekedar iseng; dan sisi penerima hoaks faktor-faktor penyebab mudahnya terpapar berita hoaks yaitu, literasi digital rendah, malas verifikasi berita dan cenderung tertarik pada konten viral dan konten yang memuat sensasi, isu SARA, dan politik. Hoaks mengalami peningkatan pada masa-masa menjelang pemilihan, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebagai senjata bagi oknum-oknum tertentu untuk membingungkan pemilih, mencari citra, mempertahankan kubu, serta menjatuhkan lawan politik.

Perisai dalam memerangi hoaks adalah literasi digital, dan pemikiran kritis adalah kunci dari literasi digital. Upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa Universitas Pattimura untuk memerangi hoaks yaitu menerapkan prinsip berpikir kritis, objektif dan sistematis, berkolaborasi dengan media atau lembaga pemerintah untuk mengasah kepekaan terhadap isu-isu yang sedang beredar, memanfaatkan sumber daya kampus seperti pujasera dan perpustakaan untuk diskusi dan pengkajian untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan daya kritis, memanfaatkan media sosial untuk memerangi hoaks melalui unggahan informasi yang actual, kredibel dan berdaya guna serta kampanye anti hoaks, dan tidak segan menegur sesama mahasiswa yang menyebarkan hoaks. Selain itu nilai-nilai Pancasila seperti nilai kejujuran, kekeluargaan, kesopanan, toleransi, serta persatuan dan kesatuan dijadikan kunci dalam berselancar di media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millennial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236.
- Allifiansyah, S. (2017). Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 151.
- Aswandi, B. and Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128.
- Fatkhurrahman (2018). Kemampuan Mahasiswa Tempatan Menilai Berita Palsu Atau “ Hoax ” Dalam Media Sosial Dalam Upaya Pengembangan Jiwa Kewirausahaan. *Jurnal Benefita*, 3(3), 417–426.
- Hasfera, D. (2017). Mewujudkan generasi literat nelalui perpustakaan perguruan tinggi (Tantangan UIN Imam Bonjol Padang Menghadapi Hoax). *Shaul al-Maktabah:Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 9(1), 41–56.
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax. *Jurnal Pekommas*, 3(1),31–44. *Jurnal Belo*, 6(3), 179–194.

- Katadata Insight Center dan kominfo. (2020). Status Literasi Digital Indonesia 2020 Status Literasi Digital Indonesia 2020.
- Kholisoh, M., Nurkhaeni, T., Surya Ningrum, P., & Fitriani, I. (2019). Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini. *Ilmu Administrasi Negara*, (39), 1–16.
- Latupeirissa, J. E., Pasalbessy, J. D. dan Leasa, E. Z. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku.
- Mahlina, M. (2019). Komunikasi Politik Dalam Demokrasi Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 53(9), 1689–1699.
- Papilaya, J. O. dan Huliselan, N. (2016). Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1), 56-63.
- Ruby, C., (2014). *Social Media and Democratic Revolution : The Impact of New Forms of Communication Democracy* By: Christina Ruby Graduation Fall , 2014 Advisor : Professor Braveboy-Wagner.
- Sardini, N. H. (2018). Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Waste Management*, 121–140.
- Simarmata, J. (2019). Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. *Serial Buku Saku*. 37
- Sujoko, A. (2020). *New Media 3 . 0 : Merancang Model Pemberdayaan Komunikasi Politik yang Interaktif*. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), 57–75.
- Supardi (2016). Teori Mahasiswa. *Jurnal Keperawatan*, (2012), 11–44.
- Suryaningsih, A. (2020). Strategi Penguatan Civic Literasi dalam Upaya Penanggulangan Hoax pada Masa Pandemi Covid-19. *PKN Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 48.